

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN PARIWISATA BUKIT KELAM DI KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Oleh:
PIRDO RAMOS SIHOTANG
NIM. E42010030

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016

E-mail : pirdo_amos@yahoo.com

Abstrak

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pada proses kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan kawasan pariwisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peranan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kawasan Pariwisata Bukit Kelam Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator, motivator, dan mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat sudah cukup baik.

Kata-kata Kunci : Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, partisipasi Masyarakat, Pembangunan

Abstract

Tourism Construction, equal with another sector of construction, is always affected by three pilan of development. They are government, private and society. Society's role is the most influence one, that is why it become a top priority, and the one that can pull the trigger of government. In result, the society will think that they have a choice. This research describes how government take role to rise Society's Participation in developing Kelam Hill tourism. The result of this research, show that role of government, as a Facilitator, Motivation and Mobilitation to rise up Society's Participation work finely.

Keywords: The Role of Culture and Tourism Agency, Society's, Participation, Development

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan sebagai suatu proses, yaitu kegiatan terus menerus dilaksanakan dalam tahap-tahap tertentu secara sadar dan terencana yang mengarah pada modernitas untuk mencapai tujuan negara.

Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kawasan wisata merupakan pembangunan yang terencana secara menyeluruh sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh

manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Objek wisata di Indonesia merupakan salah satu aset atau kawasan yang berpotensi dalam menarik wisatawan asing maupun dalam negeri.

Tujuan dari kepariwisataan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Bab II pasal 4 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa serta mempererat persatuan antar bangsa. Dengan tujuan tersebut tentu saja banyak sekali keuntungan dari pembangunan kepariwisataan tersebut.

Kegiatan pembangunan kepariwisataan, sebagaimana halnya pembangunan di sektor lainnya, pada hakekatnya melibatkan peran dari seluruh pemangku kepentingan yang ada dan terkait. Pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi 3 (tiga) pihak yaitu : Pemerintah, Swasta dan Masyarakat, dengan segenap peran dan fungsinya masing-masing. Para pemangku kepentingan tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus saling bersinergi dan melangkah bersama-sama untuk mencapai

dan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan yang disepakati.

Pada proses kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam proses pembangunan kawasan pariwisata, oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain seperti pemerintah, sehingga dengan adanya keterlibatan pemerintah besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan, karena pada dasarnya menggerakkan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata merupakan salah satu sasaran pembangunan kawasan pariwisata itu sendiri.

Teori mengatakan bahwa guna mencapai keberhasilan dalam suatu kegiatan pembangunan diperlukan keikutsertaan serta partisipasi masyarakat. Namun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan tentu tidak muncul dan berkembang dengan sendirinya. Partisipasi masyarakat tersebut dapat bertumbuh dengan peran aktif pemerintah khususnya dinas kebudayaan dan pariwisata melalui pemerintah desa yang diharapkan mampu menggerakkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti penting pembangunan kawasan pariwisata tersebut. Ketersediaan masyarakat untuk membantu setiap program sesuai

dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tentu saja partisipasi seperti ini merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata ini terdiri dari proses pembuatan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan dan evaluasi. Proses ini tidak semata-mata didominasi oleh pemerintah seperti, Bupati, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, aparat desa, BPD, pengurus RT maupun tokoh masyarakat, melainkan juga melibatkan semua unsur yang ada di kawasan pariwisata. Pembangunan kawasan pariwisata pada hakekatnya tidak terlepas dari peran aktif masyarakat di sekitarnya, karena masyarakat sendirilah yang mengalami dan merasakan hasil dari pembangunan. Sebagai penyelenggara pemerintahan maupun pembangunan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Sintang melalui aparat desa sudah selayaknya dituntut untuk menjalankan tugas dan kewajiban dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan guna mencapai pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat.

Jadi pembangunan kawasan pariwisata bukan hanya sebagai proyek pemerintah,

tetapi masyarakat juga harus menganggap bahwa proyek pemerintah itu harus sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tapi yang paling penting adalah masyarakat dianggap sebagai subjek pembangunan. Berdasarkan permasalahan di atas, partisipasi masyarakat sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan kawasan pariwisata. Pemerintah dan masyarakat hendaknya terjalin keharmonisan hubungan kerja, saling menghargai, saling menghormati, saling mempercayai, saling membantu dan saling menasehati satu dengan yang lain, saling memberikan dan menerima (*take and give*) dan saling mau menerima pendapat dan pandangan orang lain manakala kepentingan umum lebih besar dari kepentingan pribadi dan kelompok.

2. Fokus / Pusat Penelitian

Fokus penelitian dilakukan dalam setiap penelitian, agar peneliti fokus pada masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Bagaimana Partisipasi masyarakat di sekitar Kawasan Wisata Bukit Kelam.
3. Bagaimana Pembangunan di Kawasan Wisata Bukit Kelam.
4. Partisipasi apa saja yang perlu ditingkatkan oleh masyarakat dalam kegiatan pembangunan kawasan pariwisata.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dikemukakan, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.
2. Sejauh mana partisipasi masyarakat di sekitar kawasan wisata Bukit Kelam dalam pembangunan.
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata tersebut.

4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
2. Menjelaskan sejauh mana partisipasi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata Bukit Kelam dalam pembangunan kawasan pariwisata Bukit Kelam di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang.

5. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat dari penelitian tentang Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sintang Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kawasan Pariwisata Bukit Kelam Di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

a) Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan atau penelitian bagi mahasiswa

khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan, menambah pengetahuan dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata.

- b. Bagi pihak akademisi, sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji permasalahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata secara lebih spesifik dan mendalam.
- c. Bagi Universitas, sebagai sumbangan bahan bacaan untuk mahasiswa dan pihak akademisi.

b) Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan aparat Desa Kebong, Desa Kelam Sejahtera dan Desa Merpak serta Kecamatan Kelam Permai dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata tersebut.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata Bukit Kelam agar dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan dan pemeliharaan kawasan wisata tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Definisi Peran

Perananan pada dasarnya berasal dari kata peran, dalam kamus bahasa Indonesia artinya yaitu bagian dari tugas yang harus dilaksanakan. Suhardono (1994:15) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang membatasi apa yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu jabatan, sedangkan menurut Soekanto (2003: 243) peranan adalah “aspek dinamis kedudukan (status)”. Dari definisi kedua ahli tersebut mengandung makna bahwa peranan merupakan suatu hal yang sangat identik dengan pengaruh seseorang ataupun kelompok mengenai tugas yang harus dilaksanakan dalam suatu jabatan tertentu. Selain itu, menurut Rivai (2004:148) peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa peranan merupakan suatu kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan sesuai dengan jabatannya.

Definisi peranan tersebut jika dikaitkan dengan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan maka dapat diartikan bahwa peranan Dinas tersebut merupakan hak, kewajiban serta tanggung jawab yang harus dilakukan dalam menjalankan fungsinya baik dalam penyelenggaraan pemerintah,

pembangunan maupun dalam urusan kemasyarakatan. Salah satu tugas dan fungsi yang harus dijalankan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terkait penyelenggaraan pembangunan adalah peranan dinas tersebut dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata

2. Definisi Pariwisata

Menurut Gamal Suwanto (2004:3) pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai perubahan tempat tinggal sementara orang di luar tempat tinggalnya karena sesuatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan hasrat ingin mengetahui sesuatu atau tempat tujuan wisatanya. Selain itu perjalanan wisata tersebut dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan olahraga, hobi, kegiatan keagamaan dan keperluan lainnya.

3. Definisi Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan terutama kegiatan pembangunan. Hal tersebut disebabkan

oleh istilah partisipasi (*participation*) yang berarti hal turut berperan dalam kegiatan, keikutsertaan, peran serta (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1996: 732). Kata partisipasi awalnya berasal dari bahasa latin yaitu *partisipare* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keikutsertaan atau turut mengambil bagian. Menurut Adisasmita (2006:2) partisipasi berarti prakarsa, peran aktif dan keterlibatan semua pelaku pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, perumusan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dari definisi tersebut mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan guna menunjang tercapainya pembangunan sesuai harapan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Kemudian Adisasmita (2006:25) berpendapat bahwa partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kepedulian, kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan diperlukan inisiatif atau kesadaran dari masyarakat sebagai bentuk kepeduliannya terhadap

kegiatan pembangunan tersebut agar program-program yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Paul (dalam Ife dan Tesoriero, 2008:296-297) menegaskan bahwa partisipasi harus mencakup kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan Uphoff dan Cohen (Ife dan Tesoriero, 2008 : 296) berpendapat bahwa partisipasi menekankan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan keputusan. Kemudian Syafiie (1992) menegaskan bahwa partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Dari beberapa penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa partisipasi masyarakat sangat erat kaitannya dengan peran dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

4. Definisi Pembangunan

Istilah pembangunan cukup menonjol paska Perang Dunia II sebab dengan merdekanya bangsa-bangsa yang

sebelumnya terjajah, mereka mulai berkesempatan untuk memperbaiki keadaan dengan jalan membangun Negara dan kehidupan rakyatnya. Siagian dalam Safi'I (2009 : 8) mengemukakan pembangunan adalah serangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang akan ditempuh oleh suatu negara menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)

5. Definisi Partisipasi dalam Pembangunan

Mikkelsen dalam Siagian (2010: 48) berpendapat, pendekatan pembangunan partisipatoris harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka dan memberikan sarana dan yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Ini memerlukan perombakan dalam seluruh praktik dan pemikiran di samping bantuan pembangunan.

Masyarakat akan berpartisipasi dalam pembangunan, apabila mereka dapat memperoleh apa yang mereka inginkan. Karena itu tugas utama dari mereka yang bertanggung jawab di dalam program pembangunan masyarakat ialah mengidentifikasi kebutuhan yang

dirasakan masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan bantuan tentang apa yang menjadi kebutuhan mereka termasuk bagaimana menjadikan mereka memperoleh kepuasan. Dan yang paling penting adalah bagaimana mereka mampu mengidentifikasi kebutuhan yang belum mereka rasakan dan memiliki rasa sadar akan pentingnya rasa kepuasan bagi mereka.

6. Teori Peran

Tjokroamidjojo (2009:89) mengemukakan ada beberapa peran aparatur pemerintah antara lain, sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Motivator maksudnya yaitu peran pemerintah dalam memberikan motivasi, semangat, serta dorongan kepada masyarakat agar mau berpartisipasi dan berperan aktif dalam mengembangkan kawasan pariwisata. Sedangkan fasilitator adalah peran pemerintah dalam memfasilitasi dan memberikan bimbingan atau bantuan untuk melaksanakan pembangunan sehingga program pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Mobilisator yaitu peran pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut berperan aktif bersama-sama dalam kegiatan pembangunan kawasan pariwisata.

7. Teori Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi hal yang sangat penting ketika diletakkan di atas keyakinan bahwa masyarakatlah yang paling penting tahu apa yang menjadi kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Maka di dalam partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan (Kaho 2007: 127) yaitu:

- a. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan
- b. Partisipasi dalam Pelaksanaan
- c. Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan
- d. Partisipasi dalam Evaluasi

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, karena permasalahan dalam penelitian ini lebih tepat dikaji menggunakan metode penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penggalan data melalui observasi di lokasi penelitian yaitu potensi-potensi wisata yang ada di Kawasan Pariwisata Bukit Kelam serta melakukan wawancara kepada para informan yang terdiri dari berbagai macam lapisan

masyarakat. Kegiatan observasi dilakukan atas pertimbangan agar data dapat mewakili masyarakat disekitar penelitian ini.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan bertempat di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja. Hal tersebut didasarkan karena Kecamatan Kelam Permai ini merupakan salah satu kecamatan yang memiliki objek wisata unggulan di Kabupaten Sintang tetapi kurang mendapat respon positif dari masyarakat sekitarnya. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengembangan desa wisata di daerahnya dirasa penulis masih kurang. Oleh karena itu, penulis mengambil tempat penelitian di Kawasan Wisata Bukit Kelam tersebut untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya. Keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu pula dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Oleh sebab itu, faktor jarak juga mempengaruhi pemilihan lokasi penelitian.

3. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan.
2. Penelitian Lapangan.
3. Pengolahan Data.

4. Penyajian Data.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang melalui program kegiatan pengembangan potensi wisata, fasilitasi kerjasama dan pelatihan serta analisa pasar dan promosi wisata, merupakan upaya untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program kegiatan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pengembangan kawasan pariwisata itu sendiri tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, masyarakat di sekitar kawasan pariwisata tersebut juga berpengaruh dalam pengembangan tersebut. Dalam hal ini, Dinas kebudayaan dan Pariwisata dituntut untuk mampu menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator, dengan harapan pelaksanaan pembangunan yang ada di kawasan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien serta dibarengi

dengan adanya swadaya dan peran aktif masyarakat.

Berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata, peran pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menangani bidang ini tentunya sangat diperlukan. Selain sebagai fasilitator dalam pembangunan kawasan pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga berperan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat.

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai motivator

Motivator merupakan individu atau pihak yang memberikan motivasi, semangat atau dorongan kepada suatu kelompok untuk melakukan suatu perubahan ataupun tindakan guna mencapai suatu tujuan. Hal tersebut jika dikaitkan dengan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai motivator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat maka dapat diartikan peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan fungsinya untuk memotivasi dan memberikan dorongan positif kepada masyarakat agar berpartisipasi dan aktif dalam kegiatan perawatan, pembangunan maupun penjagaan kawasan pariwisata tersebut.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai penyelenggara pembangunan

mempunyai peranan yang penting tidak hanya dalam pelaksanaan program tetapi juga harus mampu menjadi sosok yang dapat dicontoh oleh masyarakat sekitar dalam kaitannya dengan peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan. Jika dilihat dari pendapat masyarakat di atas menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap kemampuan dan peran pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah cukup memuaskan.

2. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai Fasilitator

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, salah satu peran yang harus dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai fasilitator. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator yang dengan memfasilitasi dan memberikan arahan atau bantuan dana kepada masyarakat agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Melalui peran tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentunya akan lebih mudah mendorong partisipasi masyarakat, karena dengan memfasilitasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat secara tidak langsung akan menimbulkan kesan yang positif di masyarakat bahwa pemerintah peduli dan serius terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan menunjukkan adanya keseriusan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengoptimalkan kemampuan dan sumber daya yang ada untuk dapat memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan pariwisata. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata sudah berjalan dengan benar. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pemerintah desa sudah berusaha membangkitkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam pembangunan melalui berbagai upaya baik itu melalui bantuan dana, maupun bimbingan kepada kelompok pengrajin dan kelompok sadar wisata.

3. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai mobilisator

Pada konsep pelaksanaan pembangunan kawasan pariwisata sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat di sekitarnya. Masyarakat tentunya memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan yang diaplikasikan melalui keterlibatan dan peran aktif dalam kegiatan pembangunan itu sendiri. Namun peran aktif atau partisipasi masyarakat itu sendiri

tidak terlepas dari dorongan dan digerakkan oleh pihak dalam hal ini khususnya pemerintah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui aparat desa sebagai mobilisator sangat dibutuhkan dalam menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Peran dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai mobilisator dapat diartikan sebagai peran yang dimiliki oleh pemerintah dalam menggerakkan dan mengarahkan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata untuk terlibat dan ikut serta dalam kegiatan pembangunan. Sekilas definisi tersebut hampir sama dengan peran dinas kebudayaan dan pariwisata sebagai motivator, namun dalam perannya sebagai mobilisator pemerintah lebih difokuskan pada upaya menggerakkan dan mengarahkan masyarakat. Pemerintah mendampingi masyarakat secara langsung dalam melaksanakan kegiatan pembangunan.

PARTISIPASI MASYARAKAT DI SEKITAR KAWASAN PARIWISATA BUKIT KELAM DALAM PEMBANGUNAN

Berdasarkan peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tersebut, pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan pariwisata melalui Kecamatan dan Desa sudah mengikutsertakan dan mengajak masyarakat di sekitar kawasan

pariwisata untuk ikut berpartisipasi. Menurut Kaho (2007) partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dibagi dalam empat tahapan (Kaho 2007: 127) yaitu:

1. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan
2. Partisipasi dalam Pelaksanaan
3. Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan
4. Partisipasi dalam Evaluasi

Berdasarkan teori di atas, peneliti akan membahas partisipasi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata.

4. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Keputusan

Pada tahap ini partisipasi masyarakat sangat mendasar sekali, terutama karena putusan politik yang diambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan. Masyarakat hanya akan terlihat dalam aktifitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan.

5. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Partisipasi ini merupakan tindakan selanjutnya dari tahap pertama, partisipasi dalam pembangunan akan terlihat ketika masyarakat ikut serta dalam memberi kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun informasi yang

berguna bagi pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat adalah pembuatan tempat penjualan tiket pengujung atau loket, pembangunan tangga semen untuk mendaki ke puncak Bukit Kelam. Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melibatkan masyarakat sebagai staf honorer untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan kawasan wisata tersebut.

6. Partisipasi dalam Memanfaatkan Hasil Pembangunan

Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maka dalam tahap ini masyarakat secara bersama akan menikmati hasil pembangunan dengan adil tanpa ada pengecualian. Setiap masyarakat akan mendapatkan bagian sebesar kontribusi atau pengorbanan yang diberikan.

7. Partisipasi dalam evaluasi

Suatu kegiatan pembangunan dinilai berhasil apabila memberi manfaat bagi masyarakat. Maka dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menilai sendiri hasil yang sudah didapat dalam pembangunan, dan masyarakat menjadi hakim yang adil dan jujur dalam menilai hasil yang ada. Pada hasil penelitian masyarakat di sekitar kawasan Pariwisata Bukit Kelam cukup banyak

memberikan penilaian baik positif maupun negatif dari hasil pembangunan tersebut.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Sintang sebagai motivator dalam memberikan motivasi dan ajakan secara persuasif kepada masyarakat untuk berpartisipasi dinilai sudah maksimal dalam pelaksanaannya. Pemerintah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi yang dianggap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga, merawat serta mengelola hasil pembangunan. Meskipun partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan dinilai cukup baik, namun pada pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan partisipasi masyarakat di sekitar kawasan pariwisata masih jauh dari yang diharapkan.
2. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai fasilitator, sejauh ini dapat dikatakan berjalan dengan benar. Peran pemerintah dinilai masyarakat sangat membantu dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kelompok

kerajinan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Upaya pemerintah dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat mendapat respon yang positif dari masyarakat sekitar karena dinilai mampu memberikan kelancaran dalam proses pelaksanaan kegiatan pembangunan dan kegiatan sosial.

3. Peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai mobilisator dalam menggerakkan masyarakat secara keseluruhan sudah cukup baik, tetapi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, perawatan serta pengelolaan perlu ditingkatkan supaya pembangunan kawasan pariwisata ini ke depannya dapat lebih maksimal dan mencapai hasil yang diinginkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan pariwisata.

F. IMPLIKASI

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik sebagai bahan pembelajaran dan bahan referensi dalam peningkatan

pemahaman mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata. Khusus bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, diharapkan penelitian ini menjadi acuan dan pembelajaran bagi mahasiswa dalam menekuni ilmu pemerintahan terutama dalam mengkaji peran pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan, saran serta masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pariwisata, serta mampu memberikan solusi dalam pemecahan masalah terutama masalah keterbatasan dana dalam pembangunan kawasan pariwisata tersebut.

G. SARAN

Dalam Penelitian ini, adapun saran dari peneliti tidak hanya ditujukan kepada masyarakat saja tetapi kepada pemerintah

khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam menjalankan perannya sebagai motivator, fasilitator, maupun sebagai mobilisator guna meningkatkan partisipasi masyarakat perlu lebih serius dan konsisten melalui upaya pemberdayaan dan pembinaan yang lebih terkontrol agar ke depannya bisa mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.
2. Dalam proses pembangunan kawasan pariwisata, masyarakat diharapkan mampu menunjukkan, keseriusan, kreatifitas, inisiatif serta inovatif sehingga lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan yang ada khususnya dalam pembangunan kawasan pariwisata tersebut.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diharapkan mampu membangun koordinasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan dinas lain terkait masalah pembangunan, masyarakat di sekitar kawasan pariwisata serta dapat menarik minat pihak ketiga (swasta) untuk dapat bekerjasama dalam membangun kawasan pariwisata dengan harapan

terciptanya pembangunan yang terpusat, sesuai sasaran dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

H. KETERBATASAN PENULISAN

Keterbatasan yang dihadapi peneliti pada penelitian ini yaitu ada beberapa narasumber yang tidak berada di tempat, sehingga hasil yang didapat kurang maksimal. Hal tersebut menjadi kendala bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini. Oleh karena itu, skripsi ini belum dapat dikatakan sempurna karena masih terdapat kekurangan maupun keterbatasan dalam proses penyusunannya.

I. REFERENSI

1. Bacaan / Literatur :

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Creswell, W. J. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. EdisiRevisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- , L. J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Patilima, H. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :Alfabeta.

Pitana, I. G & Surya, I. K. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta :Andi.

Safi'I, 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.

Siagian, 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT BumiAksara

Soekanto, S. 2003. *Sosiologi : Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soetomo. 2010. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Suhardono, E. 1994. *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-----, 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sumaryadi, N. 2010. *Sosiologi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia

Suwantoro, G. 2004. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta :Andi.

Rivai, V. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjokroamidjojo, B. 2000. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press.

Tohardi, A. 2008. *Petunjuk Penulisan Skripsi Mahasiswa Program Studi Ilmu*

Pemerintahan, Pontianak : Prodi IP FISIP UNTAN.

Yoeti, A. O. 1996. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung :Angkasa.

Murniarti. 2008. *Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata (Studi Deskriptif Kualitatif tentang partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa wisata Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi. Surakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret.

2. Dokumen / Undang – Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan.

BPS. 2010. *Kabupaten Sintang dalam Angka*. Sintang

BPS. 2010. *Monografi Kecamatan Kelam Permai*. Sintang

3. Rujukan Elektronik :

<http://www.canboyz.co.cc/2010/05/pengertian-definisi-partisipasi.html>.

Diunduh pada 19 juni 2014

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2138028-tujuan-partisipasi-masyarakat/>.

Diunduh pada 19 juni 2014

<http://sacafirmansyah.wordpress.com/2009/06/05/partisipasi-masyarakat/>.

Diunduh pada 19 juni 2014



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : PIRDO RAMOS SIHOTANG
NIM / Periode lulus : E42010030 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : pirdo_ramos@yahoo.com / 0853 9333 5203

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exlusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KAWASAN
PARIWISATA BUKIT KELAM DI KECAMATAN KELAM PERMAI
KABUPATEN SINTANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....



Dr. H. Wiyaya Kusuma, MA
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 17 Maret 2016

(Pirdo Ramos Sihotang)